

**PERAN KEJAKSAAN MELALUI PUSAT
PEMULIHAN ASET (PPA) DALAM
MENYELESAIKAN BARANG SITAAN DAN BARANG
RAMPASAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Oleh :

Grace Sonya Putri Kinanti

201610115119



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Kejaksaan Melalui Pusat Pemulihan Aset
(PPA) Dalam Menyelesaikan Barang Sitaan Dan
Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana Korupsi

Nama Mahasiswa : Grace Sonya Putri Kinanti

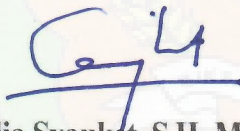
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115119

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 30 Juli 2020

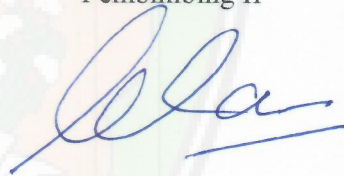
MENYETUJUI,

Pembimbing I



Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.
NIDN. 0303116302

Pembimbing II



Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H.
NIDN. 0322047703

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peran Kejaksaan Melalui Pusat Pemulihan Aset
(PPA) Dalam Menyelesaikan Barang Sitaan Dan
Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana Korupsi
Nama Mahasiswa : Grace Sonya Putri Kinanti
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115119
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Fakultas Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juli 2020

Bekasi, 30 Juli 2020

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.

NIDN. 0319046403

Penguji I : Dr. Dwi Seno Widjanarko S.H., M.H.

NIDN. 0331017006

Penguji II : Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H.

NIDN. 0322047703

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H
NIDN. 0308018202

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Grace Sonya Putri Kinanti

NPM : 201610115119

TTL : Langsa, 17 Mei 1996

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Peran Kejaksaan Melalui Pusat Pemulihan Aset (PPA) Dalam Menyelesaikan Barang Sitaan Dan Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana Korupsi*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 30 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Grace Sonya Putri Kinanti

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Grace Sonya Putri Kinanti

NPM : 201610115119

TTL : Langsa, 17 Mei 1996

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERAN KEJAKSAAN MELALUI PUSAT PEMULIHAN ASET (PPA) DALAM MENYELESAIKAN BARANG SITAAN DAN BARANG RAMPASAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI**.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 30 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Grace Sonya Putri Kinanti

ABSTRAK

Grace Sonya Putri Kinanti. 201610115119.*Peran Kejaksaan Melalui Pusat Pemulihan Aset Dalam Menyelesaikan Barang Sitaan Dan Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana Korupsi,*

Kejahatan korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi dapat merugikan keuangan negara sehingga menjadi prioritas utama bagi Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan Negara. Dalam prakteknya, terhadap perkara tindak pidana korupsi yang telah disidangkan dan putusannya bebas maka tidak mungkin menuntut kerugian terhadap keuangan negara karena kepada siapa negara menuntut kerugian keuangan negara tersebut. Dengan adanya putusan bebas maka siapa yang harus bertanggung jawab secara pidana menjadi tidak jelas dan perbuatan melawan hukum juga menjadi kabur. Sehingga dengan tidak ada kejelasan perbuatan melawan hukum dan beban pertanggung jawaban secara pidana maka tuntutan kerugian keuangan negara sangat sulit untuk diajukan gugatan secara perdata. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan, antara lain : 1. Peran Kejaksaan melalui lembaga PPA ini belum optimal, hal ini disebabkan karena pemulihan aset hasil korupsi dalam peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi dan KUHAP terlalu sederhana dan masih bersifat konvensional sehingga tidak memungkinkan memulihkan aset secara efektif dan efisien, maka Indonesia perlu menyesuaikan peraturan perundang-undangannya dengan prinsip-prinsip dan standar-standar yang berlaku secara universal sebagaimana tercantum dalam UNCAC 2003. 2. Upaya yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan melalui lembaga Pusat Pemulihan Aset (PPA) untuk mengoptimalkan perannya dalam memulihkan aset negara yang dikorupsi. Upaya-upaya tersebut antara lain: a. Melakukan pelacakan dan penelusuran aset terhadap aset-aset yang dikorupsi oleh para pelaku; b. Melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang dikorupsi oleh para pelaku sebagai langkah agar aset-aset yang dikorupsi tidak dialihkan kepada pihak ketiga; c. Melakukan perampasan aset terhadap aset-aset yang dikorupsi oleh pelaku; d. Jalinan kerjasama antara Indonesia dengan *StAR Initiatives*, dan e. Melakukan pelelangan terhadap aset-aset yang dikorupsi oleh pelaku yang sudah disita maupun dirampas guna pengembalian kerugian negara yang timbul dari tindak pidana korupsi. Kemudian yang menjadi saran dalam penelitian ini, antara lain : 1. Untuk mengoptimalkan pemulihan aset hasil korupsi yang dilakukan oleh lembaga Kejaksaan melalui Pusat Pemulihan Aset (PPA) adalah melakukan kerjasama internasional dalam bentuk *Mutual Legal Assistance (MLA)* sebagai langkah pencegahan aset hasil korupsi disembunyikan didalam maupun ke luar negeri; dan 2. Sebagai upaya mengoptimalkan pemulihan aset hasil korupsi, maka perlu adanya penguatan aspek legalitas adalah disahkannya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi Undang-Undang Perampasan Aset.

Kata Kunci : Kejaksaan, Pusat Pemulihan Aset, Barang Sitaan dan Barang Rampasan

ABSTRACT

Grace Sonya Putri Kinanti. 201610115119. *The Role of the Prosecutors' Office Through the Asset Recovery Center in Settling Confiscated Goods and Seized Goods as a Result of Corruption Crime,*

Corruption crime committed by corrupt perpetrators can harm state finances so that it becomes a top priority for the Prosecutor in efforts to eradicate criminal acts of corruption is to maximize recovery of state financial losses. In practice, the cases of corruption that have been tried and the verdict are free then it is not possible to claim damages to the state finances because to whom the state is demanding financial losses of the state. blurred. So that with no clarity of acts against the law and the burden of criminal liability, the state financial loss claim is very difficult to file a lawsuit in civil. By using juridical normative research methods, the results of this study can be concluded, among others: 1. The role of the Prosecutor's Office through this PPA institution is not yet optimal, this is due to the recovery of assets resulting from corruption in the laws and regulations eradicating criminal acts of corruption and the Criminal Procedure Code is too simple and still conventional so that it is not possible to recover assets effectively and efficiently, then Indonesia needs to adapt its laws and regulations to the principles and standards that apply universally as stated in UNCAC 2003. 2. Efforts that can be made by the Prosecutor's Office through the Central agency Asset Recovery (PPA) to optimize its role in recovering corrupt state assets. These efforts include: a. Tracking and tracing assets against corrupted assets by the perpetrators; b. Confiscating assets that are corrupted by the perpetrators as a step so that the assets that are corrupted are not transferred to third parties; c. Conduct assets confiscation of assets that have been corrupted by the perpetrators; Cooperation between Indonesia and StAR Initiatives, and e. Tender for assets that have been confiscated by perpetrators who have been confiscated or seized to recover state losses arising from corruption. These efforts include: a. Tracking and tracing assets against corrupted assets by the perpetrators; b. Confiscating assets that are corrupted by the perpetrators as a step so that the assets that are corrupted are not transferred to third parties; c. Conduct assets confiscation of assets that have been corrupted by the perpetrators; Cooperation between Indonesia and StAR Initiatives, and e. Tender for assets that have been confiscated by perpetrators who have been confiscated or seized to recover state losses arising from corruption. Then the suggestions in this study include: 1. To optimize the recovery of assets resulting from corruption carried out by the Prosecutor's Office through the Asset Recovery Center (PPA) is to conduct international cooperation in the form of Mutual Legal Assistance (MLA) as a measure to prevent corruption assets hidden. inside and outside the country; and 2. As an effort to optimize the recovery of assets resulting from corruption, it is necessary to strengthen the legality aspect is the passing of the Draft Asset Seizure Law into the Asset Seizure Law.

Keywords: Prosecutor's Office, Asset Recovery Center, Confiscated Goods and Seized Goods

KATA PENGANTAR

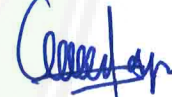
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan karunia – Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Kejaksaan Melalui Pusat Pemulihan Aset (PPA) Dalam Menyelesaikan Barang Sitaan Dan Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana Korupsi”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini pada pokoknya membahas mengenai kendala Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan dalam proses pengembalian aset hasil korupsi, kendala dimaksud adalah dalam melakukan penelusuran, melacak, menyita dan melakukan perampasan terhadap aset-aset yang dikorupsi sangat membutuhkan waktu yang cukup panjang dan juga harus melalui mekanisme *Mutual Legal Assistance* (MLA) sehingga Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan perlu dioptimalkan pengembalian aset agar aset-aset yang dilarikan ke luar negeri dapat dikembalikan ke Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bimbingan, dukungan dan doa dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Bambang Karsono, S.H.,M.M selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H.,M.H.,M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H.,S.Pd.,M.H selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

4. . Ibu Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si selaku Pembimbing Skripsi I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dukungan, saran serta masukan dalam skripsi ini.
5. Bapak Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H selaku Pembimbing Skripsi II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dukungan, saran serta masukan dalam skripsi ini.
6. Bapak Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingannya dalam masa kuliah penulis di Fakultas Hukum.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Poltak Napitupulu dan Ibu Dista Br. Tambunan atas kasih sayang, doa dan dukungan penuh hingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Jakarta, 30 Juli 2020



Grace Sonya Putri Kinanti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Perumusan Masalah	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4.1. Tujuan Penelitian	6
1.4.2. Manfaat Penelitian	7
1.5 Kerangka Teoritis.....	8
1.6 Kerangka Konseptual	11
1.7 Kerangka Pemikiran (<i>Framework</i>)	13
1.8 Sistematika Penulisan	14
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	 16
2.1. Pengertian Kejaksaan R.I, Tugas Dan Kewenangan Kejaksaan RI dan Jaksa Dalam Memulihkan Aset Hasil Korupsi	16
2.1.1 Pengertian Kejaksaan R.I.....	16
2.1.2 Tugas Dan Kewenangan Kejaksaan RI	17
2.1.3 Jaksa Dalam Memulihkan Aset Hasil Korupsi	26

2.2. Pengertian Aset, Pusat Pemulihan Aset (PPA) dan Peran Pusat Pemulihan Aset dalam pemulihan Aset.....	27
2.2.1. Pengertian Aset.	27
2.2.2. Pengertian Pusat Pemulihan Aset (PPA).	29
2.2.3. Peran Pusat Pemulihan Aset dalam pemulihan Aset	31
2.3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi dan Jenis serta Karakteristik Tindak Pidana Korupsi	44
2.3.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.	44
2.3.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	46
1. Tindak Pidana Yang Merugikan Keuangan Negara	46
2. Tindak Pidana Korupsi "Suap"	47
3. Tindak Pidana Korupsi "Pemerasan"	50
4. Tindak Pidana Korupsi "Penyerobotan"	51
5. Tindak Pidana Korupsi "Gratifikasi"	52
2.3.3. Karakteristik Tindak Pidana Korupsi	53
BAB III. METODE PENELITIAN	55
3.1. Jenis Penelitian	55
3.2. Pendekatan Penelitian	55
3.3. Sumber Bahan Hukum.....	56
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	58
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	58
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
4.1 Peran Kejaksaan Melalui Lembaga Pusat Pemulihan Aset Dalam Mengoptimalkan Memulihkan Aset Negara Yang Dikorupsi	59
4.2 Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Kejaksaan Melalui Lembaga Pusat Pemulihan Aset Untuk Mengoptimalkan Perannya Dalam Memulihkan Aset Negara Yang Dikorupsi	73
BAB V. PENUTUP.....	83
5.1 Simpulan	83

5.2 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85

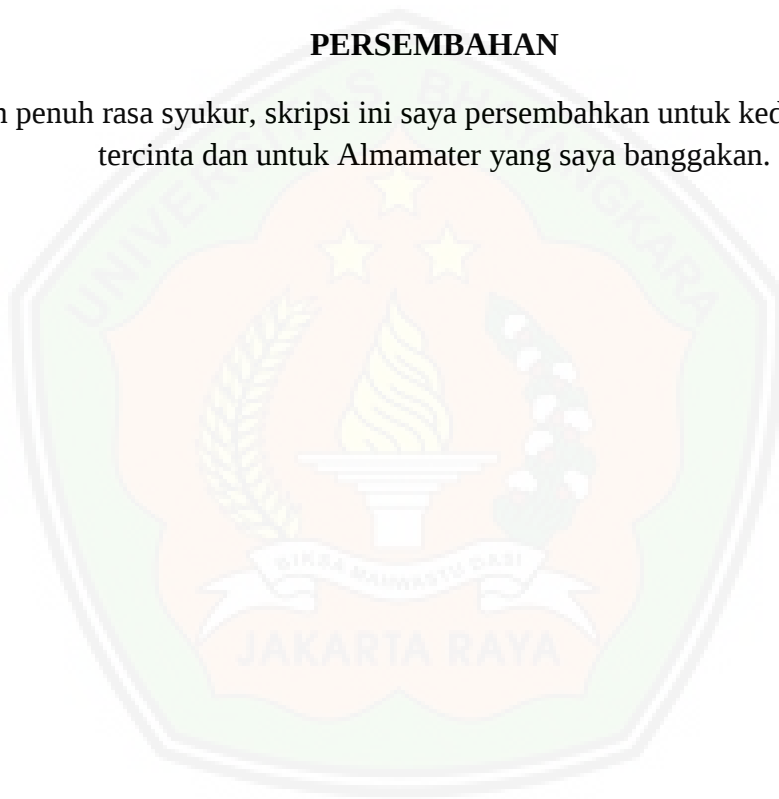


MOTTO

Apa Pun Juga Yang Kamu Perbuat, Perbuatlah Dengan Segenap Hatimu Seperti
Untuk Tuhan dan Bukan Untuk Manusia

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, skripsi ini saya persembahkan untuk kedua Orang Tua
tercinta dan untuk Almamater yang saya banggakan.



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
PPA	Pusat Pemulihan Aset
MLA	<i>Mutual Legal Asistance</i>
jo	<i>Jounto</i>
RUU	Rancangan Undang-Undang
MoU	Memory Of Understanding
SE	Surat Edaran
PERJA	Peraturan Jaksa Agung
DATUN	Perdata dan Tata Usaha Negara
UNCAC	<i>United Nation Convention Againts</i>
BMN	Barang Milik Negara
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
BPPN	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

